

ABSTRAK

Perseroan Terbatas atau PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki kemungkinan akan dihadapkan kepada kepailitan. Dalam kepailitan, harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pribadi komisaris merupakan dua hal yang tidak dapat disatukan. Namun, pada faktanya di Indonesia kerap terjadi kasus seorang komisaris digugat pailit oleh kreditur secara pribadi untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang PT, hal ini mendorong percampuran harta yang mengakibatkan kekayaan pribadi komisaris disita dan dilelang demi membayar hutang-hutang PT yang kemudian merugikan komisaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder beserta data tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian dikaji secara sistematis dengan cara menganalisis teori hukum dengan peraturan hukum secara umum kemudian secara khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi bilamana telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip Komisaris. Namun di sisi lain, komisaris dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, jika telah terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. Lebih lanjut, tanggung jawab dan kedudukan komisaris terhadap hutang-hutang PT pailit harus dibuktikan secara mendasar dan mendalam sebelum bertanggung jawab secara pribadi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Komisaris, Kepailitan.

ABSTRACT

Limited Liability Company or Ltd is a legal entity that has the possibility of being faced with bankruptcy. In bankruptcy, the assets of the limited company and the personal assets of the commissioner are two things that cannot be unite. However, in fact in Indonesia there are often cases of a commissioner being sued for bankruptcy by creditors personally to be responsible for the debts of the limited company, this encourages the mixing of assets which results in the commissioner's personal wealth being confiscated and auctioned to pay the debts of the limited company which then disadvantages the commissioner.

This research uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The types of data used are primary data, secondary data along with tertiary data collected by means of literature studies and then reviewed systematically by analyzing legal theory with legal regulations in general and then specifically.

The results of the research indicate that commissioners cannot be held personally liable if they have carried out their duties in accordance with the principles of the Commissioner. On the other hand, it is possible for commissioners to be held personally liable, if they have been proven to have been negligent in carrying out their duties and have caused losses to the limited company. Furthermore, the responsibility and position of the commissioners towards the debts of the bankrupt PT must be proven fundamentally and deeply before being held personally liable

Keywords: Responsibility, Commissioner, Bankruptcy.